

PERSAINGAN, GESEKAN, DAN PERTUMBUHAN PARIWISATA: STUDI KASUS KINAHREJO

Andeka Rocky Tanaamah

Fakultas Pascasarjana Interdisiplin
Universitas Kristen Satya Wacana
atanaamah@staff.uksw.edu

Titi Susilowati Prabawa

Fakultas Pascasarjana Interdisiplin
Universitas Kristen Satya Wacana

Neil Samuel Rupidara

Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Kristen Satya Wacana

Abstract

Tourism is a potential economic sector that contributes to more sustainable economic growth. Not only focusing on economic growth, tourism has also been proven in improving livelihoods as well as increasing benefits for local communities. Tourism can however be a field of rivalry or tension in the society. This article aims to analyse rivalry and clash happen among tourism actors and other elements of the society in Kinahrejo, also with government, which is caused by the growth of tourism in Kinahrejo. Emerging dark tourism in Kinahrejo has stimulated the growth of relevant businesses. However, the growth of tourism has also led to competition and friction in the management of local resources. This study looks at three forms of friction that occur in the management of Kinahrejo tourism assets. First, friction between the tourism actors in Kinahrejo caused by the desire to control the tourism resources. Second, friction between tourism business and stone sand mining business, caused by the lucrative offer of income. Third, friction with the government related to the relocation policy of the people of kinahrejo to a safer place and avoid the eruption of Mount Merapi. Completion of friction is done by optimizing the role of the community association in facilitating relationships between the various groups involved in tensions.

Keywords : Persaingan, Gesekan, Pertumbuhan Pariwisata, Kinahrejo, Paguyuban

Pendahuluan

Pariwisata merupakan sektor ekonomi yang potensial menyumbang pada pertumbuhan ekonomi secara lebih *sustainable*. Studi Balaguer dan Cantavella-Jordá (2002) di Spanyol memberi bukti kontribusi pariwisata dalam pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka panjang. Kontribusi pariwisata tersebut dibuktikan signifikan terutama pada konteks negara-negara berpendapatan rendah ke menengah, sebagaimana temuan studi Eugenio-Martin, Morales, dan Scarpa (2004) di Amerika Latin. Topangan sektor pariwisata pada pertumbuhan itu misalnya tampak pada kasus Mauritius sebagai negara dengan perekonomian berbasis pertanian yang kemudian memasukkan sektor pariwisata ke dalam model pertumbuhan ekonominya dan beralih dari negara berpendapatan rendah ke menengah (Durberry, 2004). Pariwisata karenanya dipandang sebagai katalis pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, termasuk bagi masyarakat lokal seperti di daerah-daerah pertanian yang relatif tertinggal (Briedenhann dan Wickens, 2004). Tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, pariwisata telah terbukti dalam meningkatkan mata pencaharian dan dapat meningkatkan kemanfaatan lokal melalui pengembangan prioritas mata pencaharian (Ashley, 2000).

Namun, pertumbuhan yang terjadi di sektor pariwisata bersifat tidak tanpa masalah. Pariwisata dipandang juga merupakan sebuah lokasi konflik atau gesekan sosial. Ini cukup lazim terjadi misalnya di daerah pariwisata baru di mana mudah terjadi kompetisi atas pemanfaatan ruang, sumber daya, dan kepentingan-kepentingan (Dredge, 2010). Kehadiran atau eksklusivitas area pariwisata dapat menyebabkan persaingan bisnis berbasis ruang dan sumber daya yang sama sehingga dapat mendorong konflik, baik di dalam maupun antar masyarakat, juga antara masyarakat dengan pemerintah (Ashley, 2000; Asikin, 2014; Yang et al. 2013). Studi Fallon (2001) misalnya, menunjukkan terjadinya konflik antara masyarakat lokal dengan PT Sinar Lombok Indah (perusahaan pariwisata) yang didukung oleh pemerintah dan militer pada era Soeharto, akibat adanya hak istimewa yang diperoleh perusahaan tersebut dalam pembebasan lahan. Konflik itu berdampak pada tertundanya pengembangan pariwisata di daerah tersebut. Studi Mbaiwa dan Stronza (2010) di Bostwana juga menunjukkan terjadinya konflik dalam

pengelolaan bisnis pariwisata, termasuk konflik dalam komunitas berkenaan dengan monopoli sumberdaya pariwisata dengan menyingkirkan suku yang lainnya.

Kehadiran pariwisata di Dukuh Kinahrejo, Yogyakarta pasca erupsi Gunung Merapi tahun 2010 tampak menggambarkan kedua dimensi yang telah dijelaskan di atas, yakni sisi pertumbuhan serta sisi persaingan dan gesekan sosial. Pariwisata Kinahrejo bertumbuh cepat pasca erupsi Merapi itu dan telah menjadi salah sumber mata pencaharian baru bagi masyarakat, di samping sektor agraris sebagai basis tradisionalnya. Namun di tengah pertumbuhannya itu, pariwisata Kinahrejo juga menimbulkan sejumlah permasalahan, baik internal dalam sektor pariwisata maupun dengan bidang lainnya. Motif dan keinginan untuk menguasai sumber daya pariwisata telah menimbulkan persaingan di antara pelaku-pelaku usaha pariwisata Kinahrejo. Di samping itu, eksploitasi sumber-sumber daya pariwisata yang didorong keinginan untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan yang lebih tampak mengganggu pihak-pihak lain yang juga memanfaatkan sumber-sumber daya sejenis untuk aktivitas ekonomi yang lain. Dampak tersebut menyebabkan timbulnya perselisihan antara para pelaku pariwisata maupun dengan pihak lain akibat singgungan akan eksploitasi sumberdaya pariwisata. Artikel ini akan mengkaji persaingan dan gesekan yang muncul di tengah fenomena pertumbuhan pariwisata di Kinahrejo, Yogyakarta.

Temuan empiris dalam studi ini menunjukkan adanya kompleksitas dalam menggambarkan ketegangan antar pihak, baik di antara para pelaku usaha pariwisata, antara mereka dengan pelaku usaha lain, serta antara mereka dengan pemerintah. Untuk menyajikan temuan-temuan empiris di Bagian 3, artikel ini akan menyajikan terlebih dahulu dimensi teoritis berkenaan dengan topik yang diteliti (Bagian 2). Bagian Diskusi dan Kesimpulan akan menutup artikel ini. Berikut disajikan tinjauan pustaka yang relevan dengan tema fokus analisis dalam artikel ini.

Tinjauan Pustaka

Pariwisata kini dapat disebut sebagai primadona ekonomi yang baru. Balaguer dan Cantavella-Jordá (2002) memandang bahwa pariwisata merupakan sektor dominan bagi perekonomian dunia dan merupakan salah satu penyedia lapangan kerja terbesar di banyak negara. Pariwisata juga menstimulasi dan mendorong terjadinya investasi ekonomi, meningkatkan

permintaan perjalanan luar negeri, serta meningkatkan keamanan dalam negeri melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia (Inskeep, 1991). Pariwisata berperan penting dalam meningkatkan pendapatan yang *reliable* guna meningkatkan status ekonomi masyarakat lokal (Inskeep, 1991; Mbaiwa & Stronza, 2010; Melita & Mendlinger, 2013).

Adanya manfaat yang diperoleh menyebabkan masyarakat terlibat dalam bisnis pariwisata dan menjadikannya sebagai basis pengembangan penghidupan. Partisipasi ini mendorong masyarakat untuk menggunakan sumber-sumber daya pariwisata dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Geriya (1995) berkaitan dengan peran pariwisata dalam mengembangkan kebudayaan lokal, Antara (2000) dan Sutawa (2012) berkenaan dengan dampak pariwisata pada perekonomian Bali, Jomehpour & Ahmadi (2011) dalam studinya berkenaan dengan dampak pariwisata pada mata pencaharian pendesaan di Baraghan Village, François Vellas (2011) dalam kajiannya mengenai dampak tidak pariwisata dari sisi analisis ekonomi, maupun UNWTO (2013) berkenaan dengan pariwisata berkelanjutan untuk pembangunan, telah memperlihatkan kontribusi positif yang ditimbulkan oleh pariwisata pada berbagai sektor.

Namun, keterlibatan lebih banyak pihak dan karenanya berkembangnya dinamika usaha di sektor pariwisata juga memiliki dimensi lain dan dapat bersifat negatif, yakni mendorong terjadinya konflik.

Penelitian yang dilakukan oleh Ashley (2000) menunjukkan bahwa keinginan untuk menguasai sumberdaya pariwisata telah menyebabkan terjadinya konflik antara masyarakat lokal dengan pengusaha yang disebabkan karena pengambilan aset pertanian dan lahan pengembalaan, serta menutup akses terhadap sumber mata air. Hal senada juga terlihat dalam penelitian yang dilakukan oleh Fallon (2001), terkait konflik antara pengusaha besar dan pengusaha lokal di Lombok.

Yang et al., (2013) dalam penelitian di Uyghur melihat bahwa adanya konflik dalam kelompok atau komunitas menyebabkan ketegangan yang melibatkan antar individu maupun antar komunitas. Ketegangan tersebut dapat mengakibatkan dua hal yaitu: 1) Semakin meningkatkan ketegangan dan berujung pada konflik yang semakin besar antar individu maupun komunitas; 2) Ketegangan dapat menyebabkan terjadinya persatuan diantara individu maupun kelompok. Hal ini juga terlihat dalam penelitian yang dilakukan Mbaiwa & Stronza (2010) di Okavango, Walpole & Goodwin

(2000) di Taman Komodo Indonesia, Sutawa (2012) di Bali, Asikin (2014) di Gili Trawangan Lombok, merupakan sebahagian kecil dari berbagai penelitian yang menunjukkan adanya konflik yang melibatkan antar individu dan komunitas pembangunan pariwisata.

Dalam pengembangan pariwisata maka dalam proses pengembangan tidak dapat dipisahkan dari kelestarian lingkungan sebagai aset. Oleh karena itu, Djajadiningrat dkk (1997) menyimpulkan bahwa lingkungan merupakan aset penting dalam pengembangan pariwisata. Swarbrooke (1999) lebih menekankan pada keberlanjutan dengan memperhatikan unsur lingkungan, sosial, dan ekonomi. Rogers & Collins (2001) menekankan pada aspek ekologis, Ahn et al., (2002) terkait dengan kualitas hidup dan kepuasan pengunjung, Gunn (1980) dan Vehbi (2012) menekankan pada penghormatan akan keseimbangan antara lingkungan dan pengelolaan pariwisata. Penelitian-penelitian tersebut menekankan bahwa lingkungan merupakan aset penting dalam keberlanjutan pengembangan pariwisata.

Eksploitasi sumberdaya alam dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Hal ini juga berpotensi mengganggu Aktivitas pariwisata karena lingkungan yang sehat dan estetik dapat mendorong terjadinya pengembangan pariwisata. Persoalan manfaat ekonomi menjadi pertarungan antara kelompok yang pro dengan penambangan maupun kelompok yang kontra dengan penambangan. Oleh karena itu, eksternalitas pariwisata akan dapat dihindarkan apabila lingkungan sebagai aset terjaga dan dilestarikan. Avci et al. (2010) menemukan bahwa Kerusakan lingkungan akan menjadi permasalahan bagi masyarakat berpendapatan rendah.

Özkaynak et al., (2012) menyatakan bahwa Penolakan terhadap *Autonomous People's Assembly (AVA)* di Amerika Latin, disebabkan karena resiko yang ditimbulkan dari proyek tersebut terhadap penggunaan sianida dan sumber mata air pada masyarakat lokal (seperti persoalan keamanan, resiko kesehatan, prostitusi, dan ledakan populasi, dan lingkungan). Masyarakat lokal berpendapat bahwa akibat program tersebut dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi mereka baik secara tradisional seperti ke hutan dan pertanian maupun pariwisata.

Konflik dalam pengelolaan aset pariwisata juga disebabkan oleh lemahnya peran pemerintah, maupun kecemburuan masyarakat akan pengelolaan pariwisata yang lebih berorientasi pada investor (Asikin, 2014). Zeppel (2010) menilai nilai konflik sosial dan konflik interpersonal terjadi

berkenaan dengan batas wilayah, penggunaan lahan, dan kehadiran taman rekreasi. Asikin (2014) dalam studinya di Gili Trawangan, melihat bahwa konflik pertanahan yang berlarut dapat mengganggu proses pengembangan pariwisata di Lombok.

Terdapat berbagai pemaknaan yang memotivasi kepentingan terhadap eksploitasi lingkungan yang menjadi akar permasalahan terjadinya konflik. Avci et al. (2010) menganalisis faktor-faktor serta pilihan bahasa yang digunakan oleh kelompok yang melawan atau mendukung perdebatan tersebut. Penilaian bahasa muncul sebagai akibat keterlibatan berbagai aktor berkenaan dengan berbagai isu yang diangkat berkenaan dengan konstalasi ekonomi, politik, dan sosial. Bahasa *community life and livelihood* (kehidupan masyarakat dan mata pencaharian), *as a source and requirement for livelihood* (sumber kebutuhan untuk penghidupan) menjadi fokus pertentangan dalam konflik eksploitasi lingkungan.

Walton & Barnett (2007) Mengungkapkan konflik yang terjadi di negara berkembang yang disebabkan karena degradasi lingkungan. Berdasarkan kasus di Papua New Guinea, maka konflik antara pemilik tanah dan tambang Tolukama Gold Mine disebabkan oleh tiga hal yaitu ; 1) konflik di negara berkembang tidak hanya disebabkan oleh degradasi lingkungan, namun lebih karena persoalan distribusi pendapatan dari dampak yang ditimbulkan dari lingkungan yang terdegradasi; 2) Respon mereka terhadap masalah lingkungan yan disebabkan oleh tambang dilakukan melalui strategi resistensi dengan melibatkan tindakan kolektif sebagai kelompok pemilik tanah. Bekerjsama dengan LSM. Dialog merupakan sarana untuk menghindari konflik antara pemilik lahan dan tambang; 3) proses penyelesaian dengan menggunakan strategi resistensi dan tidak semata menyandarkan pada kepentingan ekonomi semata, namun lebih pada keutuhan kosmologi lingkungan.

Baiquni & Rijanta (2007) yang melihat adanya kerakusan atau ketamakan terhadap hasrat keinginan memonopoli sumberdaya pariwisata. Okazaki (2008) memandang bahwa konflik terjadi akibat adanya kebutuhan dan kepentingan di antara pemangku kepentingan. Terjadinya kompetisi yang berujung pada konflik dalam masyarakat disebabkan oleh perbedaan tujuan dan misi yang berbeda.

Reed (1997) melihat bahwa konflik memiliki relasi yang kuat dengan kekuasaan. Mengacu pada penelitian yang dilakukan pada masyarakat Quamish Kanada, relasi kekuasaan memiliki peranan yang besar dalam

perencanaan pariwisata berbasis masyarakat. Relasi tersebut terimplementasi dalam tiga arena, yaitu pembangunan yang merangsang pertumbuhan ekonomi, kebijakan alokasional yang berkenaan dengan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah, dan organisasi yang berkenaan dengan isu siapa yang membuat keputusan pada komunitas dan siapa yang bertanggungjawab.

Baiquni & Rijanta (2007) memperkenalkan sistem memancing di air keruh (*profit taking*), di mana mereka memanfaatkan konflik untuk memperoleh keuntungan di atas penderitaan orang lain dengan cara menghancurkan reputasi dan usaha pesaingnya.

Yang et al. (2013) memandang bahwa ketegangan antar individu yang disebabkan oleh dampak langsung pariwisata didasari oleh faktor seperti perilaku, demografi, dan sosio kultural. Tekanan yang ada berdampak pada perubahan perilaku dan perubahan sikap pada individu dalam hubungannya dengan yang lain. Terjadi perubahan perilaku dan sikap berakibat pada penurunan tekanan itu sendiri. Tekanan antar pribadi dengan dikendalikan langsung akibat dampak pariwisata. Perubahan perilaku dan sikap yang terjadi pada setiap individu dapat terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan perubahan akibat dampak pariwisata. Peluang pariwisata sebagai sumber pendapatan menyebabkan terjadinya ketegangan diantara individu dalam masyarakat sehingga mendorong masyarakat tersebut untuk mengejar keuntungan lebih.

Kreiner et al. (2015) melihat bahwa dalam pengembangan pariwisata yang berfokus pada komunitas, maka pengembangan tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap konflik sosial. Pada umumnya konflik yang terjadi disebabkan karena adanya perselisihan mengenai kepentingan, nilai, dan tujuan yang didukung dengan oleh kepentingan stakeholder yang berbeda. Hal ini didasarkan bahwa komunitas etnis dan pengembang luar selalu mendasarkan kepentingan tersebut pada manfaat ekonomi, terkait pemanfaatan sumber daya yang terbatas. Persoalan utama konflik dalam pariwisata berkenaan dengan persoalan budaya dan manfaat ekonomi.

Yang et al., (2013), menyarankan bahwa pemerintah harus melihat konflik sosial yang melekat dalam pengembangan pariwisata secara objektif. Pemerintah harus memiliki pemahaman terkait sifat dan potensi konflik agar dapat membedakan antara realitas dari unrealitas konflik sehingga dapat menyelesaikan ketegangan yang ada. Peran pemerintah dalam mengatasi

konflik yang disebabkan oleh dampak pariwisata sangatlah penting guna mendapatkan penyelesaian terhadap konflik-konflik tersebut.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini ingin menggali pemahaman tentang persaingan dan gesekan akibat pertumbuhan pariwisata sebagai mata pencaharian baru di Kinahrejo. Kinahrejo berada di Desa Umbulhardjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman dengan luas 42 Ha² dan jumlah penduduk 261 jiwa. Kinahrejo berada ± 4,5 Kilometer² dari puncak gunung Merapi. (Pemerintah Kabupaten Sleman, 2016). Penelitian ini menggali lebih dalam mengenai permasalahan yang timbul akibat persaingan dan gesekan baik antara pelaku usaha dalam pengelolaan aset pariwisata maupun antar masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya Gunung Merapi. Gesekan yang terjadi juga berkenaan dengan pemerintah yang disebabkan oleh kebijakan untuk melakukan relokasi. Konstruksi pengetahuan tentang persaingan dan gesekan yang ditimbulkan oleh kehadiran pariwisata sebagai mata pencaharian baru dibangun dengan melihat realitas masyarakat dalam mengembangkan mata pencaharian di tengah kerentanan erupsi (Glesne, 1999; Nelson et al. 1992).

Data yang diperoleh dengan pendekatan natural melalui percakapan apa adanya (Denzin & Lincoln, 2005) dan bebas dari setingan atau intervensi peneliti maupun pihak lain (Carey, 2008). Tehnik etnografi digunakan dalam penelitian ini guna menangkap pengalaman masyarakat Kinahrejo dalam mengelola persaingan dan gesekan yang disebabkan oleh pertumbuhan pariwisata (Maanen 1995, Hancock 2006, Schutt 2015, Creswell 2013). Pengamatan secara langsung atas aktivitas masyarakat di Kinahrejo juga dilakukan, dengan terlibat langsung dalam aktivitas yang relevan dengan situasi masyarakat. Pengamatan itu menyangkut juga upaya masyarakat membangun relasi dalam menjaga keberlangsungan pariwisata sebagai mata pencaharian baru.

Analisis tematik atas data dilakukan melalui pengembangan matriks tema-tema yang berkenaan dengan pertumbuhan pariwisata pasca erupsi. pengalaman erupsi, dan ketertarikan wisatawan ke Kinahrejo guna mengunjungi makam Mbah Maridjan yang berdampak pada pertumbuhan pariwisata. Kehadiran pariwisata menjadi pemicu persaingan dan gesekan. Hasil analisis matrik membangun tema lain seperti gesekan pelaku usaha

dengan penambang pasir serta gesekan dengan pemerintah kabupaten berkenaan dengan pengelolaan pariwisata sebagai sumber mata pencaharian baru. Hasil analisis yang diperoleh menurut Tracy (2013) perlu diinterpretasikan dengan mengacu pada konstruksi pengetahuan dalam kajian literatur tentang pertumbuhan pariwisata menjadi mata pencaharian, dan disisi lain menjadi potensi persaingan dan gesekan di masyarakat Kinahrejo.

Erupsi Merapi, Mbah Maridjan, dan Pertumbuhan Pariwisata

Fenomena erupsi Gunung Merapi tahun 2010 berdampak pada kerusakan berbagai aset dan sumber mata pencaharian masyarakat Kinahrejo. Bu Panut menuturkan bahwa harta benda seperti rumah dan ternak serta usaha yang dimiliki yang telah dikumpulkan selama bertahun-tahun hilang dalam sekejap. Pak Mitro terpaksa harus kehilangan usaha penginapan yang menjadi sumber mata pencaharian, Bu Giyem yang lari ke pengungsian dengan hanya pakaian di badan. Lain pula cerita Bu Manto, dimana ia harus kehilangan rumah, harus pindah ke Huntap yang disediakan oleh pemerintah. Sedangkan Pak Prayitno kehilangan rumah dan sapi perah yang menjadi sumberdaya penghidupannya.

Kehilangan aset dan mata pencaharian membawa derita kepedihan pada masyarakat Kinahrejo. Selama 5 bulan mereka harus tinggal di pengungsian dan menggantungkan hidupnya pada uluran tangan atau sumbangan orang. Pak Prayitno tidak dapat mengelola lahan pertanian akibat tingginya suhu awan panas. Ternak yang dimiliki mati. Kalaupun tidak mati, ternak tersebut cacat yang berdampak harga jual rendah. Bu Panut, usahanya yang sudah rata dengan tanah, sedangkan pak Mitro hanya dengan tatapan nanar memandang usaha penginapan yang atap dan kasur-kasur yang dimiliki hangus terbakar.

Kehadiran wisatawan yang datang Ke Kinahrejo telah membuka peluang mata pencaharian bagi para narasumber. Dua bulan paska erupsi Gunung Merapi mulai tampak kehadiran pengunjung yang datang berbondong-bondong ke Kinahrejo, Pak Mitro menuturkan:

“Waktu dulu itu uang seperti sampah, awal-awal kan banyak yang datang. Wah ngeri pak, pada saat naik, kendaraan itu ndak bisa naik karena saking padatnya. Kalau bis kan dak bisa naik sampai atas, karena jalannya kan press. Hanya kendaraan mobil yang mutar. kalau bis di bawah. Kalau saya dan istri saya bawa kardus, kalau mau main, saya bisa

bangun rumah yang mewah. Sungguh pak, karena saking banyaknya tamu yang datang. Uang itu tinggal plung-plung saja.”

Cerita pak Mitro diamini oleh Bu Panut yang menyatakan pada awalnya sangat ramai dan sampai macet. Tingkat keramaian digambarkan oleh Bu Panut dengan kehadiran para penjual seperti terlihat sebagai berikut:

“Oh dulu malah banyak sekali, bareng-bareng tapi kan sekarang jadi makin, dulu kan pertama ya hallah remene sekali. Jadi yang jualan juga banyak sekali”.

Kehadiran wisatawan yang ingin memenuhi rasa keinginantahuannya telah mendorong pertumbuhan pariwisata di Kinahrejo. Kehadiran berbagai objek-objek pariwisata berkaitan erat dengan erupsi seperti acara Labuhan, Jathilan, Uyon-Uyon. Tempat Meninggalnya Mbah Maridjan, Bunker, Museum, Batu Wajah Manusia, Kali Adem, Sungai Gendol, ex Bumi Camping Gladaksari, Batu Gajah, Mata Air Panas Sungai Kuning.

Pertumbuhan pariwisata di Kinahrejo telah mendorong hadirnya berbagai pekerjaan pada masyarakat Kinahrejo. Pak Suyanto mengawali dengan usaha ojek untuk mengantarkan pengunjung ke rumah Mbah Maridjan dengan tarif sekali antar Rp. 20.000,- Bu Panut memilih untuk menjual air minum dan aneka makanan ringan di pinggir jalan. Bu Giyem memilih belajar motor guna bisa menarik ojek.

Daya tarik erupsi juga disebabkan karena kehadiran Mbah Maridjan sebagai tokoh yang dikenal sebagai juru kunci gunung Merapi yang turut menjadi korban pada tanggal 26 Oktober 2010. Pengakuan akan peran Mbah Maridjan sebagai yang menarik wisatawan untuk berkunjung ke Kinahrejo, tercermin dalam pengakuan partisipan. Bu Manto dan Pak Prayitno yang menyatakan bahwa banyak wisatawan yang datang ke Kinahrejo karena ketokohan dan melihat lokasi kematian dan kuburannya.

Pertumbuhan pariwisata telah mendorong para narasumber untuk mengkonversi aset rumah tangga ke pariwisata. Misalnya Bu Manto yang sebelumnya menggantungkan mata pencaharian pada usaha ternak sapi, beralih ke sektor rumah makan dan membuka usaha las-lasan. Pak Suyanto mengandalkan pada usaha ojek dan menjadi pencari penumpang (sales), Pak Mitro mengembangkan usaha ojek, jip, pencari penumpang, serta memanfaatkan tanah bekas huniannya untuk disewakan sebagai lapangan parkir dengan tarif Rp. 1,600,000,00.-. Bu Panut tetap mempertahankan rumah makan serta penyewaan jip dan kamar mandi, Pak Mitro tetap

mempertahankan usaha penginapan serta mengembangkan usaha persewaan jip dan trail.

Persaingan dan Gesekan dalam Pengelolaan Pariwisata

Pariwisata sebagai sumber mata pencaharian telah mendorong terjadinya gesekan-gesekan diantara masyarakat Kinahrejo. Para partisipan menyampaikan bahwa gesekan-gesekan tersebut hadir sebagian bentuk adanya persaingan dalam pengelolaan aset pariwisata tersebut.

Membentuk Kelompok Baru

Pada paguyuban Jeep awalnya hanya terdapat satu wadah kelompok. Ketidakpuasan terhadap sistem pengelolaan dan pembagian jatah tarikan telah mendorong terjadinya perpecahan pada kelompok tersebut. Menurut Bu Giyem, adanya tawaran untuk mengelola sendiri usaha telah mendorong tindakan para pelaku usaha dalam kelompok jeep untuk secara diam-diam mempengaruhi anggota kelompok guna membentuk kelompok baru. Kalau pada awalnya hanya terdapat kelompok 86 Jeep Tour Community (86 MJTC), maka sampai saat ini di Kinahrejo telah berkembang menjadi 5 kelompok dengan total armada 125 unit.

Permainan Harga dan Rebutan Penumpang

Dampak persaingan tampak melalui permainan harga atau tarif sewa. Menurut pak Mitro, persaingan tidak dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan paguyuban atau pelaku usaha yang lainnya. Hal ini dilakukan melalui penurunan harga sewa yang dilakukan melalui negosiasi langsung sehingga terjadi kesepakatan di luar harga yang ditetapkan oleh paguyuban. Permainan harga pada umumnya terjadi pada saat pelayanan dilakukan di luar hari libur maupun pada hari sabtu atau hari minggu. Menurut Bu Panut, kunjungan pada hari-hari biasa di luar hari libur dan sabtu minggu menyebabkan terjadinya rebutan penumpang maupun persaingan diantara para pelaku pariwisata.

Rebutan penumpang dapat berujung pada penurunan tarif di antara para pelaku usaha di Kinahrejo. Para pelaku usaha tidak segan-segan menurunkan tarif melalui negosiasi khusus antara pengojek dan wisatawan dengan perantara calo. Pak Prayitno mengakui bahwa para pengojek tidak segan-segan untuk menurunkan tarif ojeknya tanpa diketahui oleh pengojek yang lainnya. Adapun gambarannya sebagai berikut: misalnya nilai awalnya

berkisar antara 35 – 40 ribu rupiah, dimana hasil negosiasi tinggal 10 ribu rupiah.

Pelanggaran Terhadap Aturan Main dan Kesepakatan

Para partisipan juga melihat bahwa aturan main dan kesepakatan yang dikembangkan dalam paguyuban Jeep menyebabkan ketidakleluasaan dalam mengembangkan mata pencaharian. Adanya batasan akan kepemilikan jeep perkeluarga menjadi persoalan bagi mereka. Guna menyasiasi hal tersebut, maka mereka mencari celah lewat pengatasnamaan kepemilikan jeep pada anggota keluarga. Pak Mitro menuturkan bahwa setiap keluarga dibatasi 1 unit kendaraan sebagai basis usaha dalam bisnis lava tour. Namun dalam kenyataan, terdapat keluarga yang memiliki 2-3 jeep.

Keberadaan aturan dan kesepakatan tidak lagi menjadi pedoman bagi para pelaku usaha yang berdampak pada adanya kecemburuan antar pelaku bisnis pariwisata di Kinahrejo. Menurut Pak Mitro, semua aturan main pada masing-masing paguyuban sudah ada, namun persoalannya adalah sejauhmana para pelaku mematuhi aturan tersebut. Seperti yang terlihat dalam penuturan berikut:

“Aturan sudah ada pak, kalau dulu gini pak: 1) sudah punya trill ndak boleh ngojek; 2) sudah punya jip ndak boleh ngojek, trill harus di lepas, ndak boleh nyales (calo Penumpang). Sekarang gimana pak, sudah punya jip, masih ngojek, masih nyales, coba? Gimana pak, aturan rusak..rusak semua. Saya malu pak, saya sudah beli jip, ya sudah. Saya beli lembu..lembu sapi itu, trus saya cari rumput, itu saja. Saya malu pak, nanti dibilang sudah orang tua, tapi ndak bisa jadi contoh. Sering pak, waktu saya ngobrol-ngobrol, pas waktu jaga di atas itu pak, ya ngomong ngomong tentang itu. Aturan gimana ? katanya dulu itu, kalau sudah punya trill, ndak boleh ngojek, kalau sudah beli jip ndak boleh ngojek, trillnya harus di lepas. Sekarang ini gimana, saya bilang gitu, kan harus merata. bisa beli jip, bisa ngojek, bisa nyales. Skarang ini gimana? saya bilang gitu. Sekarang sudah bisa nyales, bisa ngojek, beli jip, gimana itu? Saya ngguyu”.

Penerapan aturan yang tidak konsisten mendorong para partisipan untuk mengkomunikasikan dengan para pelaku usaha lainnya. Ada harapan bahwa para pelaku usaha kembali pada aturan main yang telah disepakati. Hal ini mendorong para partisipan seperti Pak Mitro untuk mengkomunikasikan aturan main dan mengajak para pelaku usaha untuk patuh pada aturan main.

Penyelesaian Terhadap Persaingan dan Gesekan

Proses penyelesaian terhadap berbagai permasalahan yang ditimbulkan akibat persaingan dan gesekan perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan aset pariwisata Kinahrejo. Para partisipan memandang bahwa persaingan dan gesekan merupakan hal yang dapat mengganggu relasi antar para pelaku bisnis pariwisata. Hal ini mendorong mereka untuk tidak secara terbuka menyatakan bahwa terdapat persaingan dan gesekan dalam pengelolaan pariwisata di Kinahrejo. Kalaupun terdapat persaingan atau gesekan, maka hal itu cukup di simpan dan dirasakan di bathin tanpa perlu dipertentangkan. Namun apabila terdapat persaingan dan gesekan yang muncul di permukaan, maka mereka mempercayakan pada kelompok atau paguyuban sebagai wadah penyelesaian persaingan dan gesekan tersebut. Misalnya dalam kasus penurunan tarif secara diam-diam pada paguyuban ojek wisata, dimana penyelesaian kasus dilakukan dalam paguyuban tersebut dengan mengembangkan nomor antrian.

Para partisipan menjelaskan bahwa biasanya persoalan-persoalan yang ada diselesaikan dalam pertemuan bulanan yang diselenggarakan oleh internal kelompok atau paguyuban maupun antar paguyuban. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa pengoptimalan peran paguyuban dilakukan oleh masyarakat Kinahrejo guna menghindari adanya persaingan yang berpotensi mengundang gesekan. Misalnya pada kasus penginapan, Pak Mitro mengungkapkan bahwa: “kalau ada masalah baru melibatkan pertama itu pak dukuh, kalau pak dukuh ndak bisa ngatasi, itu pak lurah, kalau pak lurah ndak bisa ngatasi baru nanti kepolisian sektor (Polsek)”.

Usaha Pariwisata Versus Usaha Tambang Pasir

Gesekan juga hadir berkenaan dengan kepentingan pengelolaan antara pariwisata dan tambang pasir. Adanya peluang pendapatan yang cukup menggiurkan dari bisnis tambang pasir telah menarik minat masyarakat untuk terlibat dalam bisnis tersebut. Harga jual satu truk pasir antara Rp. 500 ribu - Rp. 800 ribu¹ merupakan peluang perbaikan ekonomi bagi masyarakat. Para partisipan mengakui bahwa pendapatan dari bisnis tambang pasir dan batu lebih menjanjikan dibandingkan dengan mengembangkan usaha pendapatan lainnya.

¹ http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/06/150609_majalah_merapi_pasir, diakses tanggal 11 Februari 2016

Di sisi lain, eksploitasi berlebihan dapat berpotensi mengganggu pertumbuhan pariwisata Kinahrejo. Adanya aktivitas truk pasir yang sering lalu lalang pada jalan tersebut menyebabkan kerusakan jalan. Aktivitas penambangan juga melewati poros jalan kinahrejo yang juga merupakan jalur utama pariwisata. Pak Prayitno menyatakan bahwa lalu lintas truk pasir di Kinahrejo menyebabkan jalan rusak dan berlubang. Pak Mitro mempersoalkan siapa yang bertanggungjawab akibat kerusakan yang ditimbulkan mengingat selama ini pembangunan dan perbaikan jalan dilakukan secara swadaya oleh masyarakat dan tidak mendapatkan bantuan pemerintah.

Aktivitas tambang pasir juga telah mengganggu ketenangan dan kenyamanan masyarakat Kinahrejo. seperti pernyataan Bu Panut sebagai berikut:

“...Wah kalau malem saya ndak bisa tidur mendengarkan begok itu. Tiap siang malam nggak berhenti ya Alloh berisik glondangan (glondangan dalam bahasa jawa benturan antara batu dan bak truk dari besi) saking banyaknya disitu suara begok. Situ Begoksitu begok sana begok ya Alloh. Istirahatnya kalau jam 12. Nanti jam dua lanjut lagi. Ya Alloh...warga sampai protes. warga disinikan menolak begok. Soalnya to mas, itu merusak..ya..merusak gimana gitu....Jurangnya itu dalemnya berapa ratus meter sampai bisa rata ya itu biarpun yang disana mengelola itu biarpun ndak begokin tempatnya anu tanahnya sendiri juga”.

Kepentingan untuk menjadikan usaha pariwisata sebagai sumber mata pencaharian berhadapan dengan usaha tambang pasir dan batu di sisi lain. Para partisipan memandang bahwa kedua usaha tersebut merupakan sektor ekonomi sebagai basis pendapatan bagi mereka. Namun ketika proses penambangan dilakukan dengan tidak mempertimbangkan dampak terhadap usaha pariwisata, maka hal ini menimbulkan perlawanan dan protes para pelaku usaha pariwisata. Hal ini berujung penolakan warga Kinahrejo terhadap aktivitas penambangan pasir yang menggunakan alat berat. Keberatan warga Kinahrejo ditunjukkan melalui penyebaran spanduk sebagai bentuk protes dan keberatan terhadap aktivitas penambangan pasir. Berdasarkan penuturan pak Prayitno, protes tersebut disampaikan kepada pemerintah desa yang kemudian diteruskan ke Pemerintah Kabupaten Sleman. Protes dan keberatan yang dilakukan warga para pelaku usaha pariwisata terhadap usaha pasir di respon oleh Pemerintah Kabupaten Sleman melalui razia yang dilakukan pada penambang ilegal dan penggunaan

alat berat. Salah satu razia tersebut, nampak pada saat kami melakukan pengamatan lapangan pada tanggal 28 Mei 2015. Bersama Pak Prayitno, pada hari itu kami menemukan banyak truk pasir yang tidak beroperasi karena ada razia dari pemerintah Kabupaten Sleman.

Gesekan dengan Pemerintah: Dilema Mempertahankan Usaha Pariwisata

Paska erupsi tahun gunung Merapi 2010, Pemerintah Kabupaten Sleman memandang bahwa dukuh Kinahrejo merupakan wilayah yang tidak aman untuk ditinggali oleh masyarakat. Posisi Kinahrejo yang semula merupakan salah satu Desa Wisata hilang dari masterplan pengembangan pariwisata Kabupaten Sleman. Kinahrejo ditetapkan sebagai daerah yang berada pada kategori Kawasan Rawan Bencana III² tahun 2015.

Berdasarkan diskusi dengan Ibu Wulan selaku Kepala Bagian Perencanaan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, keputusan Kinahrejo sebagai wilayah KRB III didasarkan pada itikad untuk melindungi dan memberikan rasa aman pada masyarakat agar terhindar dari bahaya erupsi Merapi. Kebijakan tersebut diimplementasikan pada tahun 2015 melalui peraturan Bupati Kabupaten Sleman tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025. Perda yang diterbitkan tidak lagi mengakomodasi Desa Wisata Kinahrejo dalam perencanaan tujuan wisata. Hal ini berdampak pelarangan akan adanya aktivitas atau kegiatan di Kinahrejo.

Kebijakan pemerintah telah menjadi titik awal gesekan antara masyarakat Kinahrejo dengan pemerintah. Adanya kepentingan pariwisata sebagai mata pencaharian baru bagi masyarakat, bertentangan dengan kepentingan pemerintah untuk memberikan rasa aman. Masyarakat Kinahrejo juga memandang bahwa perhatian Pemerintah Kabupaten tidak memiliki kepedulian dan terkesan menganaktirikan masyarakat Kinahrejo. Hal ini nampak dalam pendapat Pak Suyanto yang menyatakan bahwa karena adanya kebijakan yang menempatkan Kinahrejo masuk dalam

² Berdasarkan informasi dari badan Geologi Kementrian Energi dan Sumberdaya Mineral, maka Kawasan rawan bencana III adalah kawasan yang sering terlanda material letusan berupa aliran lava, hujan abu lebat, lontaran batu (pijar), kemungkinan awan panas dan gas racun. Dimana hal ini dibedakan menjadi dua bagian nyaitu : 1) Kawasan yang sering terlanda aliran massa terdiri atas aliran lava, kemungkinan awan panas dan gas racun; 2) Kawasan yang sering terlanda material lontaran, berupa: lontaran batu (pijar), dan hujan abu (lebat). (sumber : <http://www.vsi.esdm.go.id/index.php/gunungapi/data-dasar-gunungapi/470-g-peut-sagoe?start=3>, diakses tanggal 20 Oktober 2016)

Kawasan Rawan Bencana III, maka pemerintah cenderung menganaktirikan dan tidak memperhatikan masyarakat Kinahrejo terutama yang berkaitan dengan mata pencaharian.

Para partisipan mencurigai bahwa ada motif kepentingan lain yang menunggangi pemerintah berkenaan dengan kehadiran kebijakan menempatkan Kinahrejo dalam Kawasan Rawan Bencana III. Akibat akan hal tersebut terdapat 17 KK dari 98 KK yang memutuskan untuk bertahan di Kinahrejo. Kecurigaan tersebut tergambar dalam penuturan Pak Mitro sebagai berikut:

“Ya itu, saya curiga. Bangunan dirobohkan besok dibangun sama pemerintah, gitu loh. Ada yang mau ngambil untung karena jalur wisata pak, dari jaman dulu. Dari dulu sudah banyak yang ngincar. Terkenal Mbeng sama tempatnya Mbah Maridjan. Tiap hari libur, sabtu minggu, ramai pak. Perkempingan itu luar biasa. Dekat itu lho, ada bunker, diatas ada lapangan tempat kemping dan tempatnya Mbah Maridjan. ramai sekali pak”.

Pertentangan dengan pemerintah menyebabkan masyarakat Kinahrejo secara swadaya mengembangkan fasilitas pariwisata Kinahrejo. Pengembangan infrakstruktur jalan ke lokasi wisata dilakukan dengan mengandalkan hasil retibusi guna memperbaiki infrasktruktur pariwisata, seperti jalan, penerangan, maupun pembenahan terhadap objek-objek wisata yang ada. Pembenahan infrastuktur juga tertolong dengan adanya material pasir dan batu dari Gunung Merapi, sehingga biaya yang dikeluarkan hanya untuk tukang dan semen.

Kegigihan masyarakat telah mendorong Pemerintah Sleman untuk mengizinkan masyarakat mengelola pariwisata Kinahrejo dengan syarat masyarakat harus menata lokasi pariwisata tersebut. Masyarakat Kinahrejo diperkenankan untuk berusaha dan beraktivitas untuk mengembangkan mata pencaharian. Melalui fasilitasi Pemerintah Desa Umbulharjo, diperoleh kesepakatan yang tertuang dalam surat perjanjian. Adapun kesepakatan tersebut memperbolehkan masyarakat untuk berusaha namun dengan syarat tidak boleh kembali mendiami Wilayah Kinahrejo. Secara lengkap kesepakatan itu nampak sebagai berikut : 1) yang boleh mengembangkan usaha di Kinahrejo harus masyarakat di sekitar Kinahrejo; 2) retribusi yang diperoleh dibawah koordinasi Desa Umbulharjo dan tidak ada setoran untuk Pemerintah Kabupaten Sleman; 3) peran pemerintah tidak dalam kapasitas mengelola kawasan namun hanya membina dan melakukan pendataan.

Perjanjian antara pemerintah Kabupaten Sleman dan kepala Desa Umbulharjo menjadi landasan dalam pengelolaan sumberdaya pariwisata yang ada di Kinahrejo.

Adanya surat perjanjian tidak membuat pemerintah daerah melepaskan tanggungjawabnya. Ibu Wulan menyampaikan bahwa dalam rangka pembinaan maka beberapa pelatihan diberikan kepada masyarakat Kinahrejo untuk mengembangkan kemampuan/skills, terutama yang berkenaan dengan aktivitas lava tours. Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah antara lain : 1) Pelatihan Offroader dengan mendatang Offroader berpengalaman untuk melatih supir-supir lava tours di Kinahrejo agar menjadi supir-supir yang handal; 2) Pemerintah juga melakukan penataan terhadap rute lava tour guna menjamin agar aktivitas lava tours dapat terpantau; 3) Penataan terhadap standar mobil/jeep yang dipergunakan dalam kegiatan pariwisata di Kinahrejo³.

Diskusi

Erupsi Merapi tahun 2010 telah menghilangkan seluruh aset mata pencaharian masyarakat Kinahrejo. Tidak hanya harta benda, erupsi tersebut juga telah merenggut nyawa Mbah Maridjan yang merupakan juru kunci Gunung Merapi. Kehadiran wisatawan yang begitu massif untuk melihat dan mempelajari dampak yang ditimbulkan oleh erupsi dan lokasi kematian Mbah Maridjan telah mendorong pertumbuhan berbagai usaha pariwisata di Kinahrejo. Sejalan dengan Stone (2006) maka fenomena kehadiran wisatawan dapat dipandang sebagai fenomena *dark tourism*. Dimana para wisatawan secara khusus melakukan perjalanan ke Kinahrejo untuk membangun pengetahuan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh Erupsi Merapi (M. Foley & Lennon, 1996).

Kehadiran wisatawan telah mendorong pertumbuhan berbagai usaha pariwisata sebagai pengganti usaha pertanian dan peternakan yang pada saat itu tidak dapat diandalkan. Berawal dari mengantar wisatawan ke lokasi kematian Mbah Maridjan, maka lambat laun usaha-usaha tersebut bertumbuh dan menjadi sektor usaha yang dapat diandalkan sebagai mata pencaharian. Pariwisata Kinahrejo telah menjadi sektor penting dalam

³ Penataan dilakukan oleh pemerintah mengingat banyak jeep yang dipandang liar dan tidak sesuai dengan standar yang ada. Disisi lain, penataan tersebut menjadi penting setelah terjadi kasus kecelakaan jeep yang melibatkan pejabat Kabupaten Sleman.

mengembangkan mata pencaharian dan perekonomian masyarakat Kinahrejo. Pendapat tersebut sudah dinyatakan oleh Briedenhann & Wickens (2004), dimana pariwisata Kinahrejo menjalankan peran sebagai katalis pertumbuhan ekonomi. Hal ini terlihat dari usaha lava tour (jeep dan trail), ojek, rumah makan, penginapan, retribusi dan parkir, serta kerajinan maupun souvenir. Kehadiran pariwisata di Kinahrejo telah membuka peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat seperti supir jeep, tukang ojek, pekerja dirumah makan, dan sebagai anggota kelompok retribusi dan parker.

Persoalannya sebagai aset mata pencaharian pariwisata Kinahrejo telah menjadi sentra gesekan, kami mendapatkan ada tiga gesekan yang menyertai pertumbuhan pariwisata.

Pertama, gesekan antar pelaku usaha pariwisata Kinahrejo. Dimana gesekan ini terjadi akibat keinginan untuk menguasai dan memonopoli sumberdaya pariwisata. Persaingan antar pelaku bisnis pariwisata berdampak pada gesekan diantara mereka. Berkaca pada pengalaman Namibia (Ashley, 2000) maka keinginan untuk menguasai dan memonopoli sumberdaya pariwisata menjadi penyebab terjadi gesekan antar pelaku usaha di Kinahrejo. Persaingan dilakukan melalui permainan tarif dalam rebutan penumpang. Terdapat beberapa keluarga yang memiliki jeep lebih dari satu yang melanggar kesepakatan dan aturan main tentang kepemilikan. Sedangkan pada penginapan terjadi melalui penggunaan ilmu hitam dan upaya untuk saling menjatuhkan pelaku usaha penginapan lainnya.

Keinginan untuk menguasai sumberdaya pariwisata yang ada didasarkan oleh sifat kepentingan individualis dalam diri para pelaku bisnis pariwisata. Hal ini mendorong mereka untuk menggunakan berbagai upaya dalam mensiasati aturan yang ada. Kepentingan individualis ini yang oleh Baiquni & Rijanta (2007) dipandang sebagai sifat ketamakan dan kerakusan dengan menghalalkan secara untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Berbagai siasat dikembangkan agar usaha yang dijalankan dapat memperoleh keuntungan yang lebih. Pada konteks inilah penguasaan akan aset pariwisata terbangun dari adanya sifat ketamakan tersebut sebagai bangunan sifat individualistis.

Motif untuk mendapatkan keuntungan ekonomi mendorong mereka untuk mengembangkan isu-isu yang dapat merusak nama dan usaha pelaku usaha yang lainnya termasuk didalamnya menggunakan ilmu hitam. Sejalan dengan Baiquni & Rijanta (2007), kami melihat bahwa adanya sifat untuk

mencari keuntungan sendiri dengan mengorbankan orang lain menjadi penyebab akan adanya gesekan pada pelaku bisnis pariwisata di Kinahrejo.

Gesekan juga terjadi yang disebabkan oleh karena adanya rasa ketidakadilan dan distribusi pendapatan yang tidak merata dalam menjalankan usaha tersebut. Temuan pada kasus perpecahan jeep diindikasikan karena anggota merasa bahwa dalam sistem pengelolaan belum transparan dan ada ketidakcocokan dalam pengelolaan tersebut. Perpecahan itu dijuga disebabkan karena adanya keinginan untuk mengelola sendiri usaha jeep yang dikembangkan dalam pariwisata.

Komunitas pariwisata Kinahrejo memiliki peran penting dalam meminimalisir adanya persaingan dan gesekan dalam pengelolaan pariwisata. Paguyuban pariwisata Kinahrejo memiliki peran penting dalam menentukan tarif dalam dalam bisnis pariwisata di Kinahrejo. Paguyuban merupakan media atau sarana bagi anggota kelompok untuk mendiskusikan persoalan atau permasalahan dalam pengelolaan bisnis pariwisata Kinahrejo. Diskusi-diskusi yang kami lakukan dengan para narasumber membuktikan bahwa ketika mereka mengalami masalah akibat adanya persaingan atau gesekan maka hal tersebut di bawa dalam pertemuan paguyuban guna mencari solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Meskipun terdapat narasumber yang tidak puas akan peran paguyuban, namun masyarakat Kinahrejo masih menempatkan paguyuban sebagai media untuk mengatasi masalah dan gesekan akibat persaingan yang terjadi.

Kedua, Tidak dapat dipungkiri bahwa tidak hanya usaha pariwisata yang menjadi sentra mata pencaharian masyarakat Kinahrejo. Kehadiran usaha penambangan pasir dan batu menjadi alternatif mata pencaharian yang cukup menjanjikan. Tawaran harga jual pasir yang berkisar Rp. 500.000-Rp.800.000 telah memancing masyarakat Kinahrejo yang tergiur dengan harga jual pasir. Kehadiran material pasir dan batu yang berlimpah menjadi daya tarik baru untuk mengembangkan usaha tersebut.

Adanya perbedaan pandangan antar kepentingan kelestarian lingkungan sebagai modal utama pariwisata dan tawaran pendapatan yang menggiurkan, menimbulkan gesekan-gesekan dalam masyarakat Kinahrejo. Kondisi tersebut mempertegas temuan Avci et al., (2010) berkaitan dengan argumentasi pembenaran terhadap usaha tambang pasir. Kehidupan masyarakat dan mata pencaharian serta kebutuhan untuk penghidupan telah menjadi senjata bagi mereka yang tetap mempertahankan usaha penambangan pasir.

Keinginan untuk mendapatkan keuntungan telah mendorong mereka untuk melakukan eksploitasi berlebihan tanpa memikirkan keberlanjutan lingkungan. Sejalan dengan Özkaynak et al., (2012) eksploitasi berlebihan terhadap pasir dan batu dapat menyebabkan kerusakan lingkungan serta dapat mengganggu keberlangsungan usaha pariwisata di Kinahrejo. Gesekan-gesekan antar pelaku usaha pariwisata dan tambang pasir tersebut dapat berujung pada perbedaan tujuan dan kepentingan antar pemangku kepentingan di Kinahrejo (Sofield 1996, Okazaki 2008). Gesekan yang timbul disebabkan karena pelaku usaha pariwisata memandang bahwa kehadiran usaha pasir dan batu dapat mengancam keberadaan pariwisata sebagai sumber mata pencaharian. Kondisi tersebut yang juga dilihat oleh Ashley (2000) berkenaan dengan terancamnya lahan pertanian masyarakat yang subur akibat hadirnya pariwisata di Namibia. Demikian juga dengan Vehby, (2012) yang memandang bahwa gesekan terjadi karena tidak memperhatikan keseimbangan antara tambang pasir yang berdampak pada eksploitasi lingkungan dan persinggungannya dengan pariwisata sebagai mata pencaharian.

Disisi lain, temuan Yang et al., (2013) dapat menjadi landasan dalam pemetaan gesekan sosial terkait pengelolaan usaha pariwisata dan tambang pasir. Gesekan disebabkan karena adanya perubahan perilaku dan perubahan sikap masyarakat Kinahrejo terkait kepentingan dalam pengelolaan sumberdaya sebagai dampak erupsi Merapi tahun 2010. Adanya keuntungan yang diperoleh dari bisnis menyebabkan terjadinya ketegangan antar pribadi yang berujung pada gesekan antar pribadi. Pilihan akan mata pencaharian usaha pariwisata atau usaha tambang pasir berujung terjadinya perpecahan diantara masyarakat Kinahrejo dengan masyarakat lainnya.

Ketiga, Dalam hubungannya dengan pemerintah maka persoalan utama yang mendasari gesekan adalah terkait kepentingan akan penyelamatan warga dari erupsi Merapi dan mempertahankan pariwisata sebagai mata pencaharian. Perebutan klaim terhadap sumberdaya menjadi titik pangkal dari kehadiran gesekan dalam sebuah realitas masyarakat sosial (Coser, 1986). Demikian juga dalam pandangan Yang et al., (2013), yang melihat bahwa adanya kepentingan terhadap pengelolaan aset mendorong terhadinya gesekan antara pemerintah dan masyarakat. Kami memandang bahwa terjadi perebutan klaim antara masyarakat yang mempertahankan pariwisata Kinahrejo sebagai mata sumber pecaharian, dan pemerintah yang telah menetapkan Kinahrejo sebagai Kawasan Rawan Bencana telah mendorong terjadinya gesekan. Kekukuhan pemerintah pada kebijakan

tentang Kawasan Rawan Bencana III, telah menyebabkan ketidakpedulian akan persoalan hidup masyarakat Kinahrejo.

Dilain pihak, kepentingan relokasi yang digalakkan oleh pemerintah telah membawa kecurigaan pada masyarakat Kinahrejo akan adanya kepentingan pemilik modal yang ikut mendompleng. Perkembangan pariwisata Kinahrejo dicurigai telah menarik para pemodal untuk menguasai aset pariwisata Kinahrejo. Hal ini disebabkan karena Kinahrejo memiliki potensi kunjungan wisatawan yang tidak pernah sepi, apalagi pada hari libur, sabtu, dan minggu. Isu-isu tersebut hidup kalangan masyarakat Kinahrejo yang menyebabkan adanya ketakutan kehilangan akan aset-aset yang dimiliki.

Belajar dari temuan yang disampaikan oleh Yang et al., (2013), maka gesekan menyebabkan kemandirian serta menyiapkan masyarakat untuk mampu menghadapi situasi yang mengancamnya. Adanya ketegangan yang terjadi antara masyarakat Kinahrejo dan pemerintah telah membangun ikatan komunitas yang kuat pada pelaku pariwisata Kinahrejo. ketegangan yang berujung pada ketiadaan perhatian dari pemerintah menyebabkan masyarakat Kinahrejo semakin mandiri dalam mengelola sumberdaya pariwisata. Gesekan antara pemerintah dan masyarakat Kinahrejo telah membangun *boundary* yang kuat yang melepaskan diri dari sekat-sekat ketergantungan pada pihak lain.

Gesekan bisa dihindarkan apabila dalam pengembangan pariwisata Kinahrejo terbangun atas kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan wisatawan (Yang et al., 2013). Adanya kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat Kinahrejo sebagai basis kerjasama dalam menjadikan pariwisata sebagai basis mata pencaharian masyarakat Kinahrejo. Ketidakmampuan pemerintah dalam menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat Kinahrejo dapat diantisipasi dengan memanfaatkan potensi pariwisata yang ada, tanpa mengorbankan tujuan pemberian perlindungan masyarakat dari erupsi Gunung Merapi.

Penutup

Fenomena erupsi Merapi tahun 2010 telah menarik perhatian dan daya tarik masyarakat luas akan dampak dari letusan tersebut. Dampak erupsi tersebut telah menjadi peluang berkembangnya *dark tourism* di

Kinahrejo. Kehadiran wisatawan telah menstimulasi pertumbuhan pariwisata Kinahrejo melalui kehadiran berbagai usaha-usaha seperti lava tour, ojek, rumah makan, retribusi dan parkir, dll.

Pertumbuhan pariwisata sebagai mata pencaharian diperhadapkan diikuti oleh persaingan dan gesekan yang ditimbulkan baik antar masyarakat maupun dengan pemerintah. Penelitian ini menemukan tiga persoalan yang dapat berujung terjadinya gesekan dalam pengelolaan sumberdaya pariwisata. Adapun gesekan tersebut: 1) adanya keinginan untuk memonopoli sumberdaya pariwisata melalui permainan harga dan tarif, adu domba antar pelaku pariwisata, fitnah dan penggunaan ilmu hitam, serta ketidakcocokan masalah pengelolaan aset pariwisata; 2) gesekan antar usaha pariwisata dan usaha penambangan pasir batu, dimana gesekan tersebut terjadi karena tawaran pendapatan yang menggiurkan pada usaha tambang pasir dan batu; 3) gesekan dengan pemerintah yang berkenaan dengan kebijakan relokasi warga Kinahrejo ke tempat yang lebih aman dan terhindar dari erupsi Gunung Merapi.

Persaingan dan gesekan dalam pengelolaan usaha pariwisata di Kinahrejo dapat diselesaikan dengan penempatan paguyuban sebagai wadah tempat penyelesaian antar pelaku pariwisata. Paguyuban juga menjalankan peran untuk memfasilitasi masyarakat guna menyelesaikan gesekan yang timbul dengan usaha tambang pasir dan batu. Dalam perannya terhadap permasalahan dengan pemerintah, maka paguyuban melakukan komunikasi dengan pemerintah desa agar difasilitasi dengan pemerintah Kabupaten Sleman.

Daftar Pustaka

- Ahn, B. Y., Lee, B. K., & Shafer, C. S. (2002). Operationalizing sustainability in regional tourism planning: An application of the limits of acceptable change framework. *Tourism Management*, 23(1), 1–15. [https://doi.org/10.1016/S0261-5177\(01\)00059-0](https://doi.org/10.1016/S0261-5177(01)00059-0)
- Antara, M. (2000). Dampak pengganda usaha kecil sektor pariwisata terhadap pertumbuhan perekonomian bali: suatu pendekatan model input-output. *OJS Universitas Udayana*, 618(1), 1–24.
- Ashley, C. (2000). The impacts of tourism on rural livelihoods: Namibia's experience. *Sustainable Livelihood*, 128(5), 1–34.
- Asikin, Z. (2014). Penyelesaian Konflik Pertanahan Pada Kawasan Pariwisata

- Lombok (Studi Kasus Tanah Terlantar di Gili Trawangan Lombok). *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(654), 239–250.
- Avci, D., Adaman, F., & Özkaynak, B. (2010). Valuation languages in environmental conflicts: How stakeholders oppose or support gold mining at Mount Ida, Turkey. *Ecological Economics*, 70(2), 228–238. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2010.05.009>
- Baiquni, M., & Rijanta, R. (2007). Konflik Pengelolaan Lingkungan dan Sumberdaya Dalam Era Otonomi dan Transisi Masyarakat. *Bumi Lestari Journal of Environment*, 7(1). Retrieved from <http://ojs.unud.ac.id/index.php/blje/article/viewFile/2414/1642>
- Balaguer, J., & Cantavella-Jordá, M. (2002). Tourism as a long-run economic growth factor: the {Spanish} case. *Applied Economics*, 34(7), 877–884. <https://doi.org/10.1080/00036840110058923>
- Briedenhann, J., & Wickens, E. (2004). Tourism routes as a tool for the economic development of rural areas-vibrant hope or impossible dream? *Tourism Management*, 25(1), 71–79. [https://doi.org/10.1016/S0261-5177\(03\)00063-3](https://doi.org/10.1016/S0261-5177(03)00063-3)
- Carey, J. W. (2008). *Communication as Culture, Revised Edition: Essays on Media and Society* (Revised Ed). Routledge: Routledge Taylor & Francis Group. Retrieved from <http://books.google.it/books?id=N2aRAgAAQBAJ>
- Coser, R. L. (1986). Cognitive structure and the use of social space. In *Sociological Forum* (Vol. 1, pp. 1–26). Springer.
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Research design Qualitative quantitative and mixed methods approaches*. <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2005). *Handbook of Qualitative Research* (3rd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications Ltd.
- Djajadiningrat, S. T., Mantik, Wibawa, F. A., Kusumaatdmaja, M. S., & Sarwono. (1997). *Pengantar ekonomi lingkungan*. Jakarta: LP3S.
- Dredge, D. (2010). Place change and tourism development conflict: Evaluating public interest. *Tourism Management*, 31(1), 104–112. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2009.01.004>
- Durbarry, R. (2004). Tourism and economic growth : the case of, 10(4), 389–401.
- Eugenio-Martin, J., Morales, N., & Scarpa, R. (2004). Tourism and economic growth in Latin American countries: a panel data approach. *Papers.Ssrn.Com*. Retrieved from http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=504482
- Fallon, F. (2001). Conflict, power and tourism on Lombok. *Current Issues in*

Tourism, 4(6), 481–502. <https://doi.org/10.1080/13683500108667899>

- François Vellas. (2011). *The Indirect Impact Of Tourism: An Economic Analysis*.
- Geriya, I. W. *Pariwisata dan dinamika kebudayaan lokal, nasional, global : bunga rampai antropologi pariwisata (1995)*. Cetakan 1. Denpasar, Bali : Upada Sastra, [1995]. Retrieved from <https://search.library.wisc.edu/catalog/999853407402121>
- Gunn, C. A. (1980). *Tourism planning*. Crane Russak.
- Hancock, B. (2006). An Introduction to Qualitative Research Au t hors. *Qualitative Research*, 4th, 504. <https://doi.org/10.1109/TVCG.2007.70541>
- Inskip, E. (1991). *Tourism planning: an integrated and sustainable development approach*. Van Nostrand Reinhold.
- Jomehpour, M., & Ahmadi, S. (2011). Effect of Tourism on Sustainable Rural Livelihoods (Case Study: Baraghan Village - Savojbolagh County), 9–14.
- Kreiner, N. C., Shmueli, D. F., & Ben Gal, M. (2015). Understanding conflicts at religious-tourism sites: The Baha'i World Center, Israel. *Tourism Management Perspectives*, 16, 228–236. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.04.001>
- M. Foley, & Lennon, J. J. (1996). “Jfk and dark tourism – a fascination with assassination,,” *International Journal of Heritage Studies*, 2(4).
- Maanen, J. Van. (1995). Chapter 1 An end to innocence: the ethnography of ethnography. In J. Van Maanen (Ed.), *Representation in ethnography* (pp. 1–35). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Mbaiwa, J. E., & Stronza, A. L. (2010). The effects of tourism development on rural livelihoods in the Okavango Delta, Botswana. *Journal of Sustainable Tourism*, 18(5), 635–656. <https://doi.org/10.1080/09669581003653500>
- Melita, A., & Mendlinger, S. (2013). The Impact of Tourism Revenue on the Local Communities' Livelihood: A Case Study of Ngorongoro Conservation Area, Tanzania. *Journal of Service Science and Management*, 2013(March), 117–126. <https://doi.org/10.4236/jssm.2013.61012>
- Nelson, C., Treichler, P. A., & Grossberg, L. (1992). Cultural Studies: An Introduction. *Cultural Studies*, 1–16.
- Okazaki, E. (2008). A Community-Based Tourism Model: Its Conception and Use. *Journal of Sustainable Tourism*, 16(5), 511. <https://doi.org/10.2167/jost782.0>
- Özkaynak, B., Labajos, B., Arsel, M., Avci, D., Carbonell, M. ., Chicaiza, G., ... Krishna, V. . (2012). Mining conflicts around the world. *Ejolt*, 7(7), 198.
- Pemerintah Kabupaten Sleman. (2016). *Sebaran Data Penduduk Kawasan Rawan Bencana III dan II Gunung Merapi*.

- Reed, M. G. (1997). Power Relations and Community- Based Tourism Planning. *Annals of Tourism Research*, 24(3), 566–591. [https://doi.org/10.1016/S0160-7383\(97\)00023-6](https://doi.org/10.1016/S0160-7383(97)00023-6)
- Rogers, M. F., & Collins, Y. M. J. (2001). *The future of Australia's country towns*. (M. F. Rogers & Y. M. J. Collins., Eds.). Centre for Sustainable Regional Communities, La Trobe University.
- Schutt, Russel, K. (2015). *Investigating the Social World: The Process and Practice of Research* (Eighth). Boston: University of Massachusetts Boston.
- Sofield, T. H. B. (1996). Anuha Island resort, Solomon Islands: a case study of failure. *Tourism and Indigenous Peoples.*, 176–202.
- Stone, P. R. (2006). A Dark Tourism Spectrum : Towards a Typology of Death and Macabre Related Tourist Sites , Attractions and Exhibitions, 54(2), 145–160.
- Sutawa, G. K. (2012). Issues on Bali Tourism Development and Community Empowerment to Support Sustainable Tourism Development. *Procedia Economics and Finance*, 4(Icsmed), 413–422. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(12\)00356-5](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(12)00356-5)
- Swarbrooke, J. (1999). sustainable tourism management. Cabi.
- Tracy, S. J. (2013). *Qualitative research methods: Collecting evidence, crafting analysis, communicating impact*. UK: John Wiley & Sons.
- UNWTO. (2013). Sustainable Tourism for Development, 1–227. Retrieved from http://www.sustainabletourisonline.com/awms/Upload/Resource/bookshop/Crouch_modelDestnComp-web.pdf
- Vehbi, B. O. (2012). *A Model for Assessing the Level of Tourism Impacts and Sustainability of Coastal Cities*. INTECH Open Access Publisher.
- Walpole, M. J., & Goodwin, H. J. (2000). Local economic impacts of dragon tourism in Indonesia. *Annals of Tourism Research*, 27(3), 559–576. [https://doi.org/10.1016/S0160-7383\(99\)00088-2](https://doi.org/10.1016/S0160-7383(99)00088-2)
- Walton, G., & Barnett, J. (2007). The Ambiguities of “Environmental” Conflict: Insights from the Tolukuma Gold Mine, Papua New Guinea. *Society & Natural Resources*, 21(1), 1–16. <https://doi.org/10.1080/08941920701655635>
- Yang, J., Ryan, C., & Zhang, L. (2013). Social conflict in communities impacted by tourism. *Tourism Management*, 35, 82–93. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2012.06.002>
- Zeppel, H. (2010). Managing Cultural Values in Sustainable Tourism: Conflicts in Protected Areas. *Tourism and Hospitality Research*, 10(2), 93–115. <https://doi.org/10.1057/thr.2009.28>